

## **Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013**

*(Analysis of the Number of Population, GDRP, and Regional Spending on  
Regional Tax Revenue in District Jombang 1998-2013)*

Rendra Fahmi, Badjuri, Aisah Jumiati

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

*E-mail:* rendra7692@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of this research was to investigate the effect of the population , Gross Regional Domestic Product, and regional expenditure of local tax revenue in the district Jombang 1998-2013. Analysis techniques to determine the effect of independent variables are dependent variables used multiple linier regression analysis by computer program Eviews 7. The result showed that simultaneously that the number of people, gross regional domestic product , and regional expenditure has a significant against local tax revenue in the district Jombang. In partial gross regional domestic product and regional expenditure influential positive and significant against local tax revenue because nine grdp sector describe the results of the economy increases the economy increases local tax revenue in Jombang, district while regional expenditure used for development of facilities and infrastructure will increase productivity and profitability economic agents that will increase the local tax revenue. The number of population it has value that is not significantly to local tax revenue because there are still inhabitant of free local taxes .Variable gross regional domestic product having influence the dominant against local tax revenue in the district Jombang.*

**Keywords:** *Gross Regional Domestic Product , Local Taxes, Regional Expenditure, The Number of Populations*

### **1. Pendahuluan**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk meratakan pembangunan beserta hasil-hasil pembangunan di daerah perlu mendapatkan perhatian sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami pengembangan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Santosa & Rahayu, 2005: 9). Untuk itu pemerintah memberlakukan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali semua potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan guna menciptakan kemandirian daerah. Dalam menciptakan kemandirian daerah serta melaksanakan kewajiban daerah maka diperlukan adanya sumber pendapatan/penerimaan

daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Sudantoko (2003:83) yaitu: "Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dari penerimaan daerah terbesar khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam menopang pengeluaran rutin daerah dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan PAD adalah dengan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus dapat digali secara maksimal tetapi tetap dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau DPRD tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan (Hamrolie, 2004:142).

Munurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan mengidentifikasi potensi sektor pajak daerah ditujukan untuk dapat mengoptimalkan sektor ini dalam pembiayaan pembangunan di daerah.

Peningkatan PAD khususnya pajak daerah suatu wilayah tentu tidak lepas dari kondisi ekonomi suatu daerah yang terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali potensi pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah kedepannya.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak yang strategis diantaranya terdapat jalur provinsi lintas tengah yang merupakan jalur aktifitas perekonomian Jawa Timur. Salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Jombang adalah pajak daerah. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang dari tahun 2009-2012.

**Tabel 1. Perkembangan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Besarnya Kontribusi (%)
2008	97.601.053.792	15.642.628.867	16,03
2009	90.214.137.927	17.784.228.520	19,71
2010	109.154.035.428	19.023.022.752	17,43
2011	124.799.217.856	24.705.170.574	19,8
2012	164.389.353.734	31.887.920.746	19,4

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2008-2012 selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Meski pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang mengalami penurunan menjadi Rp. 90,214,137,927,- dari tahun sebelumnya, akan tetapi sumbangan pajak daerah tetap

mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Jombang dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki khususnya pada sektor pajak daerah.

Aktifitas penduduk dalam perekonomian tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan lain sebagainya. Menurut Norfridwitya (dalam Susanto, 2014:3) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk karena penduduk sebagai subjek penggerak perekonomian daerah.

Meningkatnya aktifitas pelaku ekonomi tentu harus diimbangi dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan anggarannya dalam belanja daerah atau konsumsi pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Dengan meningkatnya produktifitas para pelaku ekonomi maka akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang. Hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun 1998-2013? (2) Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun 1998-2013? (3) Bagaimanakah pengaruh belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang tahun 1998-2013?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013. (2) Mengetahui pengaruh PDRB ADHK 2000 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013. (3) Mengetahui pengaruh belanja daerah pada tahun sebelumnya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2013.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori.

### **2.2 Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui pihak yang berkepentingan dan berkaitan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan DPPAKD Kabupaten Jombang. Data jumlah penduduk ( $X_1$ ), PDRB ADHK 2000 ( $X_2$ ) dan Penerimaan pajak daerah ( $Y$ ) diambil mulai dari tahun 1998-2013. Data belanja daerah ( $X_3$ ) diambil mulai tahun 1997-2012.

### **2.3 Metode Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang dapat dinotasikan secara fungsional sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya ditransformasikan kedalam bentuk logaritma sebagai berikut (Gujarati, dalam Santosa dan Rahayu, 2005:15) :

$$\ln Y_t = \beta_0 + \beta_1 (\ln X_1)_t + \beta_2 (\ln X_2)_t + \beta_3 (\ln X_3)_{t-1} + e \dots (2)$$

Dimana :

- Y = Penerimaan Pajak Daerah  
 $\beta_0$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi parsial untuk X1, X2, X3  
X1 = Jumlah Penduduk  
X2 = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000  
X3 = Belanja Daerah  
t = Tahun (time)  
e = Error term  
Ln = Logaritma Natural

### 3. Hasil Penelitian

#### 3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda**

Keterangan	Koef. Regresi	t hitung	Prob.
Konstanta	-35,77019	-1,093047	0,2958
LnX1	1,228175	0,505070	0,6227
LnX2	1,951395	3,973342	0,0018
LnX3	0,237832	2,281531	0,0416
R <sup>2</sup>	= 0,957629		
F hitung	= 90,40402		
Fprob	= 0,000000		
Dw hitung	= 1,562425		

Sumber : data dioalah, 2015

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah :

$$\text{Ln}Y_t = -35,77 + 1,228 (\text{Ln}X_1)_t + 1,951 (\text{Ln}X_2)_t + 0,23 (\text{Ln}X_3)_t - 1$$

- Nilai koefisien 1,288 pada jumlah penduduk, menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk 1%, maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 1,288%, dan sebaliknya;
- Nilai koefisien 1,951 pada PDRB ADHK 2000, menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB ADHK 1%, maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat penerimaan pajak daerah sebesar 1,951%, dan sebaliknya;
- Nilai koefisien 0,238 pada belanja daerah, menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja daerah 1%, maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat penerimaan pajak daerah sebesar 0,238%, dan sebaliknya;

### 4. Pembahasan

Besarnya  $R^2$  (koefisien determinasi) adalah 0,9576 menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu jumlah penduduk ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ), dan belanja daerah ( $X_3$ ) dalam menjelaskan variabel terikat atau penerimaan pajak daerah (Y) secara simultan adalah sebesar 95,76% dan sisanya yaitu sebesar 4,24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

#### 4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Uji t-statistik dan koefisien pada variabel jumlah penduduk diketahui bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah

penduduk maka penerimaan pajak daerah juga akan semakin meningkat. Sehingga hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang ditolak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Liberty (2013) menyatakan bahwa jumlah penduduk berdampak positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jumlah penduduk juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian Santosa & Rahayu (2005) dan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana penerimaan pajak daerah merupakan subsektor dari pendapatan asli daerah. Pengaruh yang tidak signifikan kemungkinan dipengaruhi masih adanya penduduk yang tidak terdaftar sebagai subjek pajak daerah (wajib pajak). Pengangguran merupakan mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2010). Jika masyarakat yang tidak produktif dapat ditekan, maka subjek pajak daerah akan meningkat. Pada akhirnya hal ini akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **4.2 Pengaruh PDRB ADHK 2000 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan uji t-statistik dan koefisien pada variabel PDRB diketahui bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Sehingga Hipotesis penelitian kedua (H2) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan di Kabupaten Jombang diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Apip Supriadi (2009) yang berjudul “Determinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 1994-2005”. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa PDRB mempunyai elastisitas yang positif terhadap pajak daerah. Meningkatnya PDRB menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian pada daerah tersebut. Meningkatnya perekonomian suatu daerah, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan pada masyarakat menyebabkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga meningkat. Sektor-sektor dalam PDRB ada yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak daerah diantaranya hotel dan restoran sehingga dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan sektor-sektor tersebut. Maka dengan meningkatnya PDRB pada sektor-sektor tersebut maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah pada sektor tersebut juga. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susanto (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang Tahun 1998 – 2012”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian dari sektor PDRB atas dasar harga konstan berupa Hotel dan Restoran yang memegang peran pajak hotel dan pajak restoran memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian lain yang berkesimpulan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah diantaranya yaitu Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu pada tahun 2005, Hadi Sasana pada tahun 2005, dan Mucholifah pada tahun 2010.

#### **4.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan uji t hipotesis penelitian ketiga (H3) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah Tahun Sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Koefisien pada variabel belanja daerah tahun sebelumnya sebesar 0.237832 yang berarti apabila dalam variabel belanja

daerah naik 1% serta variabel yang lain bernilai nol, maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0.237832%. Hal ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Chenery & Syrquin mengatakan pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan prasarana guna melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat akan berdampak pada peningkatan penerimaan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2004). Pengoptimalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang juga didalamnya terdapat pajak daerah harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai macam belanja yang dialokasikan oleh pemerintah hendaknya manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar pajak apabila kualitas serta kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan berbagai sarana dan prasarana yang sangat penting guna meningkatkan produktifitas perekonomian lebih diutamakan.

Dalam penelitian Santosa & Rahayu (2005) yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaa Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri” menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa apabila belanja daerah yaitu pengeluaran pembangunan meningkat maka penerimaan PAD diantaranya pajak daerah juga akan meningkat. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Supriadi (2009) yang menyatakan bahwa kosumsi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Karena masih terdapatnya pengangguran atau penduduk yang belum produktif di Kabupaten Jombang sehingga subjek pajak daerah belum maksimal serta kemampuan penduduk untuk menyumbangkan pendapatannya terhadap pemerintah daerah melalui pajak juga tidak maksimal.
- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Karena PDRB merupakan cerminan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Semakin meningkat PDRB Atas Dasar Harga Konstan pertahunnya menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi semakin baik serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah juga semakin meningkat. Beberapa subsektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan berhubungan langsung terhadap pajak daerah yaitu hotel dan restoran. Semakin besar subsektor hotel dan restoran PDRB Atas Dasar Harga Konstan maka penerimaan pajak daerah juga akan semakin besar.
- c. Belanja Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Karena peningkatan belanja daerah dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik akan dapat meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Meningkatnya produktifitas perekonomian akan berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak daerah akan meningkat.

**5.2 Saran Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jombang yang meliputi akurasi data subjek dan objek pajak. Sehingga subjek dan objek pajak yang seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak bisa terdaftar sebagai wajib pajak.
- b. Meningkatkan beberapa sektor yang dominan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan salah satunya adalah hotel dan restoran. Sehingga para investor tertarik untuk membangun usaha di Kabupaten Jombang termasuk usaha perhotelan dan restoran.
- c. Meningkatkan alokasi belanja daerah dalam hal peningkatan fasilitas dan layanan publik yang berguna untuk meningkatkan produktifitas masyarakat di Kabupaten Jombang.
- d. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu diperhatikan penentuan target berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada pemungut dan pembayar pajak atas prestasi yang diberikan.

**Daftar Pustaka**

- BPS. Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2010
- DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2013.
- Hamrolie, Harun. 2004. *Analisis Peningkatan PAD*. Yogyakarta: BPF.
- Liberty, Setia Neo. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jember*. Tidak Diterbitkan. Jurnal Ilmiah. Jember: Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2004. *Optimalisasi Belanja Modal*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Purbayu Budi & Rahayu, Retno Puji. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. *Dinamika Pembangunan* Vol.2 No.1 Juli 2005 hal 9-18.
- Sudantoko, Djoko H. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Supriadi, Apip. 2009. *Determinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 1994-2005*. *Jurnal Ekonomi*, Vol.4 No.1. FE UNSIL. ISSN: 1907-9958 hal 529-535.
- Susanto, Iwan. 2014. *Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012)*. Tidak Diterbitkan. Jurnal Ilmiah. Malang: Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.